

**PERANAN PEMERINTAH KOTA PADANG
MENGATASI ANAK NELAYAN YANG PUTUS SEKOLAH
DI KELURAHAN PASIR NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

VANESSA

16042037/2016

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang
Putus Sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang

Nama : Vanessa

NIM/TM : 16042037/2016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Februari 2021
Disetujui oleh:
Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

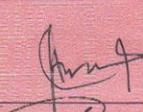
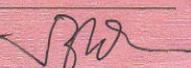
Pada Hari Selasa, 02 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB

**Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang Putus Sekolah di
Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang**

Nama : Vanessa
NIM/TM : 16042037/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Februari 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	1. 
2. Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A	2. 
3. Anggota	Adil Mubarak, S.IP., M.Si	3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanessa
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 22 Februari 1998
NIM/TM : 16042037/2016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul " Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang Putus Sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang" merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Februari 2021



Vanessa
16042037/2016

ABSTRAK

Vanessa : Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak
16042037 Nelayan yang Putus Sekolah Di Kelurahan Pasia Nan
Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Padang mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan mengetahui faktor-faktor penyebab anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan tipe penelitian menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo diantaranya membuat program PKBM bagi anak yang putus sekolah di Kota Padang, membuat SMP filial, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan kasus yang penulis temukan di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor lingkungan, kesadaran orang tua tentang arti pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor motivasi.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kota Padang, Anak Nelayan Putus Sekolah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang Putus Sekolah Di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Zikri Alhadi, S.IP., MA selaku Penguji I.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku penguji II
7. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis
9. Staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Ibu Dra. N. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Padang.
11. Ibu Wahyu Eka Kartika, S.Pd., MM selaku Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan Dinas Pendidikan Kota Padang.
12. Bapak Taslim selaku Lurah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.
13. Ibu Rina Wati selaku Program Manajer di Gugah Nurani Indonesia.
14. Masyarakat nelayan dan anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.
15. Kedua orang tua: Mama dan Papa, adik-adik serta keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Olivia Safritan Putri yang telah mau membantu penulis dari awal penulis membuat skripsi ini hingga selesai.

17. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendoakan, memberikan semangat serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2016, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
19. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik itu moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Yaa Robbal Alamin. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga penelitian yang penulis susun ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Aamiin.

Padang, Oktober 2020

Vanessa
16042037

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Peranan	12
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	13
3. Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan.....	19
4. Konsep Nelayan.....	21
5. Konsep Pendidikan	23
6. Konsep Anak Putus Sekolah.....	28
B. Penelitian yang Relevan.....	33
C. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	38

E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Temuan Umum.....	46
1. Gambaran Umum Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.....	46
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Padang.....	48
B. Temuan Khusus.....	51
1. Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang Putus Sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.....	51
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.....	60
C. Pembahasan.....	74
1. Peranan Pemerintah Kota Padang Mengatasi Anak Nelayan yang Putus Sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.....	74
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.....	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah anak nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo	4
Tabel 3.1 informan penelitian	37
Tabel 4.1 jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Pasia Nan Tigo	46
Tabel 4.2 jumlah data PKBM per Kecamatan Di Kota Padang	56

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka konseptual	34
Gambar 4.1 surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Padang tentang penetapan sekolah filial	53
Gambar 4.2 PKBM Suka Maju Sejahtera yang mengadakan ujian semester paket B dan paket C	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (UU No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8)). Berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa menggali potensi yang ada di daerahnya termasuk sumber daya manusia. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menjamin hak-hak masyarakatnya, karena pemerintah daerah lebih dekat secara wilayah sehingga dapat memahami dan mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya termasuk dalam bidang pendidikan (Elsa dkk, 2019).

Pada era sekarang ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting dimiliki seseorang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, terencana, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 Tahun 2003). Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, pendidikan juga bertanggung jawab

dalam pembentukan pribadinya. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dilingkungan keluarga dan masyarakat (Nina, 2006). Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor penunjang bagi seseorang untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 mengatakan : 1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dan dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 juga telah dijelaskan, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Di Sumatera Barat, pada tahun 2020 ini, Dinas Pendidikan sedot 31 persen APBD Sumatera Barat. Dengan anggaran tersebut di harapkan pendidikan di Sumatera Barat harus lebih baik. Dalam anggaran tersebut juga terdapat alokasi dana untuk program dana BOS (Antara Sumbar, 2020). Dengan adanya alokasi dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat menekan angka putus sekolah di Sumatera Barat.

Namun kenyataannya masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah di Sumatera Barat. Pada tahun 2018/2019 jumlah anak putus sekolah masih tinggi yaitu terdiri dari 872 anak tingkat SD, 1220 anak tingkat SMP dan 509 tingkat SMA(Statistik Pendidikan, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2018-2019 jumlah anak yang putus sekolah di Kota Padang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 jumlah anak yang putus sekolah mencapai 237 siswa. Terdiri dari 86 anak tingkat SD, dan 151 anak ditingkat SMP. Sementara pada Tahun 2019, angka anak putus sekolah terus bertambah yaitu mencapai 338 anak. Terdiri dari 196 anak ditingkat SD dan 142 anak ditingkat SMP (Padang Ekspres, 2019).

Kelurahan Pasir Nan Tigo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Kelurahan Pasir Nan Tigo mempunyai 2726 Kartu Keluarga (KK) yang 55% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terdiri dari nelayan tetap dan nelayan sambilan. Rata-rata penghasilan nelayan baik itu buruh nelayan ataupun nelayan yang mempunyai sampan kecil yaitu Rp 1.650.000-2.000.000 per zbulan (DKP Sumbar).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan yang dibantu oleh kelompok nelayan di Kelurahan Pasir Nan Tigo yaitu diantaranya kelompok nelayan yang berada di Pasir Sebelah, Pasir Kandang dan Pasir Jambak, pada tahun 2019 tercatat 48 anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.

Tabel 1.1
Jumlah anak nelayan yang putus sekolah pada tahun 2019 di
Kelurahan Pasir Nan Tigo

NO	NAMA	L/P	TINGKAT PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	Sukma	L	6 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
2.	Febri	L	4 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 05 Kel. Pasia Nan Tigo
3.	Reski	L	4 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
4.	Anes	L	5 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
5.	Angga	L	4 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
6.	Yuda	L	4 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
7.	Rafki	L	4 SD	Jalan Pasir Kanang Rt 01 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
8.	Abel	L	2 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
9.	Abil	L	3 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
10.	Yuda	L	4 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
11.	Jodi	L	5 SD	Jalan Pasir Jambak Rt 04 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo
12.	Nanda	P	1 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
13.	Fadil	L	5 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
14.	Rama	L	5 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
15.	Surya	L	6 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
16.	Aldo	L	5 SD	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
17.	Rafi	L	5 SD	Jalan Pasir Jambak Rt 04 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo
18.	Rizky Fernando	L	4 SD	Jalan Pasir Jambak Rt 03 RW 10 Kel. Pasia Nan Tigo
19.	Riski Fajri	L	5 SD	Jalan Pasir Jambak Rt 03 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo

20.	Gebril	L	4 SD	Jalan Pasir Sebelah Rt 04 RW 03 Kel. Pasia Nan Tigo
21.	Asep	L	2 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
22.	Rafli	L	2 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
23.	Yoga	L	3 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
24.	Fajar	L	1 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
25.	Grespo	L	1 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 12 Kel. Pasia Nan Tigo
26.	Resgi	L	1 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 12 Kel. Pasia Nan Tigo
27.	Rehan	L	2 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 02 rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
28.	Egi	L	2 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
29.	Annisa	P	3 SMP	Jalan Pasir Jambak Rt 03 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo
30.	Hakim	L	3 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 01 Rw 05 Kel. Pasia Nan Tigo
31.	Ikkal	L	2 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
32.	Awendra	L	3 SMP	Jalan Pasir Kandang Rt 04 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
33.	Asri Wulandari	P	2 SMP	Jalan Pasir Jambak Rt 04 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo
34.	Ikkal Milyudha	L	2 SMP	Jalan Pasir Sebelah Rt 03 Rw 03 Kel. Pasia Nan Tigo
35.	Bintang	L	2 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
36.	Dafa	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
37.	Rian	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
38.	Tegar	L	3 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
39.	Rahman	L	2 SMK	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
40.	Rudi	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 02 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
41.	Yoga	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 09 Kel. Pasia Nan Tigo
42.	Vina	P	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw

				08 Kel. Pasia Nan Tigo
43.	Yudi	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 04 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
44.	Falen	L	1 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 04 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
45.	Robi	L	2 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
46.	Januardy	L	2 SMA	Jalan Pasir Jambak Rt 03 Rw 10 Kel. Pasia Nan Tigo
47.	Rozi Angga	L	1 SMA	Jalan Pasir Sebelah Rt 02 Rw 03 Kel. Pasia Nan Tigo
48.	Weli	L	2 SMA	Jalan Pasir Kandang Rt 03 Rw 08 Kel. Pasia Nan Tigo
JUMLAH				48 Anak

Data diatas mengenai jumlah anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo pada tahun 2019. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo, terdapat 20 anak di tingkat SD, 14 anak tingkat SLTP, dan 14 anak Ditingkat SLTA. Anak-anak nelayan yang putus sekolah ikut melaut bersama orang tuanya. Bagi masyarakat, menjadi nelayan tidak harus mendapat ilmu pendidikan dari pendidikan formal seperti sekolah. Bahkan orang yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan pun juga bisa menjadi nelayan dengan mendapatkan pelatihan dari orang tua dan juga dari lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, salah satu penyebab anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo yaitu anak-anak nelayan sudah bisa merasakan mencari uang sendiri, dengan mereka ikut orang tua melaut, berjualan ikan bahkan ada yang menjadi buruh nelayan mamayang dan membagan.

Terkait hal itu, peneliti sudah mewawancarai lurah. Pada tahun 2020 ini Kelurahan Pasir Nan Tigo melakukan upaya untuk mengatasi anak nelayan yang putus sekolah dengan membuat program kerja dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo. Seperti yang dikatakan Bapak Taslim selaku Lurah di Kelurahan Pasir Nan Tigo, pada tanggal 6 Maret 2020:

“Iya disini memang ada anak nelayan yang putus sekolah. ada yang dari mereka putus sekolah disebabkan karena mereka merasa telah bisa mendapatkan uang sendiri dengan ikut melaut bersama orang tuanya, ada yang menjadi buruh bagan, ada yang menjadi buruh payang dan ada juga yang dari mereka menjual ikan dari hasil upah yang mereka terima yang telah membantu nelayan. Dalam upaya mengatasi anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo, tahun ini kita sudah membuat program kerja kelurahan dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, montir dan keterampilan lainnya bagi anak-anak yang putus sekolah. Akan tetapi, program ini belum berjalan atau terlaksana. Namun, sudah kita masukan ke dalam salah satu program kerja kita untuk tahun ini”.

Sama halnya yang disampaikan dengan Bapak Taslim selaku Lurah di Kelurahan Pasir Nan Tigo, Ibu Marzaida selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Nan Tigo juga membenarkan hal tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 :

“Pada tahun ini memang benar kita ada program kerja mengenai pemberian pelatihan keterampilan seperti menjahit, montir dan keterampilan lainnya bagi anak yang putus sekolah. Program ini baru kita buat untuk program kerja kelurahan tahun ini, namun program ini belum terlaksana. Selain itu, untuk penanganan anak yang putus sekolah, kita juga bekerja sama dengan pihak GNI (Gugah Nurani Indonesia). GNI menyediakan tempat belajar bagi anak-anak yang putus sekolah. Selain itu, GNI juga memfasilitasi adanya paket belajar A, B dan C untuk anak yang putus sekolah.”

Terkait hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marzaida, Ibu Marzaida juga mengatakan pada tahun ini pemerintah kelurahan menjalin kerjasama dengan

sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Gugah Nurani Indonesia (GNI). Gugah Nurani Indonesia adalah suatu lembaga nasional, lembaga swadaya masyarakat non profit atau organisasi kemanusiaan non pemerintah yang bekerja sesuai dengan pilar-pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berkenaan dengan hak-hak anak dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, GNI ada di 15 Kota di Indonesia salah satunya di Kota Padang tepatnya di Kelurahan Pasir Nan Tigo yang dimana kantor pusatnya untuk Indonesia berada di Jakarta. GNI mulai berdiri di Kota Padang sejak tahun 2009. Untuk menjalankan misinya GNI mendapatkan dukungan dan sekaligus dana dari *Good Neighbors International* yang berkantor pusat dari Korea.

Pada tahun ini, salah satu program yang dibuat oleh GNI terkait pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan yaitu adanya program paket belajar A, B, dan C bagi anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo. Dalam hal ini, GNI memfasilitasi bagi anak yang putus sekolah untuk bisa belajar. Disini, GNI sebagai penghubung. GNI bekerjasama dengan pemerintah kelurahan untuk mendata anak yang putus sekolah lalu mengantarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Parupuak Tabing. Terkait program tersebut, saat ini anak yang dibina berjumlah 27 anak. (Gugah Nurani Indonesia).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis telah melakukan penelitian tentang “peranan Pemerintah Kota Padang mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.”

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018/2019 jumlah anak putus sekolah masih tinggi yaitu terdiri dari 872 anak tingkat SD, 1220 anak tingkat SMP dan 509 tingkat SMA. Dan Data dari Dinas Pendidikan Kota Padang, jumlah anak putus sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019.
2. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 48 orang anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.
3. Salah satu penyebab anak nelayan putus sekolah di sebabkan oleh, anak nelayan sudah bisa merasakan mencari uang sendiri dengan ikut melaut bersama orang tua, menjual ikan dan ikut sebagai buruh nelayan.
4. Pada tahun 2020 pemerintah kelurahan Pasir Nan Tigo membuat program kerja pemberian keterampilan untuk anak yang putus sekolah, namun program ini belum terlaksana.
5. Adanya kemitraan antara pemerintah kelurahan pasir nan tigo dengan gugah nurani indonesia untuk memberikan pembinaan kepada anak yang putus sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun penulis ingin memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada

permasalahan mengenai peranan Pemerintah Kota Padang mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pemerintah Kota Padang mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan pemerintah Kota Padang mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak nelayan putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.

F. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya, sistem pemerintahan daerah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :
 - a. Bagi Pemerintah Kota, penelitian ini diharapkan untuk diberikan upaya agar meminimalisir bertambahnya angka putus sekolah terutama pada anak nelayan dan dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anak yang putus sekolah.

- b. Bagi Pemerintah Kelurahan Pasir Nan Tigo, penelitian ini diharapkan pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian lagi kepada anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo. Diharapkan adanya upaya yang diberikan oleh pihak kelurahan untuk anak putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo dan semoga segera menerapkan program yang telah dibuat sehingga bisa memberdayakan anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasir Nan Tigo.
- c. Bagi keluarga nelayan/ anak yang putus sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada keluarga nelayan terutama anak yang putus sekolah bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan anak mereka dan untuk mereka nantinya.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti sehingga mampu mendiskripsikan peranan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi anak nelayan yang putus sekolah serta faktor-faktor yang menyebabkan anak nelayan yang putus sekolah khususnya di Kelurahan Pasir Nan Tigo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2010 : 212) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut sudah menjalankan suatu peranan. Peranan lebih menunjuk kepada fungsi, penyesuain diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang yang menduduki suatu posisi didalam masyarakat juga menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan dalam masyarakat. Dalam arti, peranan merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu bagi struktur sosial.

Menurut Thoha (2008 : 80) peranan adalah bentuk interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dalam bahasa organisasi peranan didapat dari uraian jabatan. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang.

Menurut Poerwadarminta (1995 : 751) peran dapat diartikan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada suatu keadaan atau peristiwa, dimana perilaku yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau emiliki jabatan pada tatanan masyarakat. Merton dalam Raho (2007 : 67) peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada individu yang menduduki jabatan atau kedudukan tertentu.

Menurut Andi (2020 : 3) hakikatnya peranan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan, oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

Dari bebrapa pengertian peranan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian peranan. Peranan adalah bagaimana seseorang berperilaku dalam menjalankan hak dan kewajibannya, berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan kedudukan atau posisi yang ditempati dimasyarakat atau dalam berorganisasi.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan,

mampu dan berkharismatik dalam menjalankan roda pemerintahan (Inu Kencana , 2005). Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, mmiliki sifat yang universal, sistematis dan spesifik. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata “perintah” yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut Robinson dalam Muhadam Labolo (2014: 23) pemerintahan mengacu pada proses bagaimana pengelolaan politik, gaya atau model penyelesaian masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Taliziduhu, 2003). Menurut Finer dalam Muhadam Labolo (2014: 16) pemerintah menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada proses pemerintahan. yang kedua, pemerintah menunjukkan dimana proses pemerintahan berlangsung. Yang ketiga, pemerintah menunjukkan orang yang menduduki jabatan pada pemerintahan sebagai pelaksana kekuasaan. Yang keempat, pemerintah mengacu pada aspek bentuk, sistem atau metode pemerintahan dalam masyarakat yaitu struktur dan bagaimana pengelolaan badan

pemerintahan serta bagaimana hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 9) pemerintah merupakan sebagai organisasi negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut Wilson dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 10) pemerintah adalah suatu pengorganisasian yang kuat, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kuat angkatan senjata, tetapi dua atau sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan mereka, dengan hal-hal memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai pemerintah, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi yang terdiri dari dua atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan berdasarkan kewenangan-kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa :

“Pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengertian pemerintah daerah diatas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah segala urusan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola atau mengurus rumah tangga daerahnya sendiri yang mencakup segala aspek.

c. Konsep Pemerintah Kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian sembilan (9) pasal 127 mengatakan pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah (Perda) berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Pengertian kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Kedudukan dan Tugas Kelurahan diatur dalam Bab III pasal 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

- a. Pada pasal 3.
 1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
 2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat.
 3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
 4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III /c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.

c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

b. Pada Pasal 4.

1. Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
3. Urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
4. Pelimpahan urusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
5. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

c. Pada Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal

4, Lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

3. Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan

Ada beberapa peran yang diharapkan dapat dijalankan oleh pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan di Indonesia menurut Sihombing dalam Siti Nurjanah (2014 : 89) yaitu :

1. Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Dalam mengembangkan pendidikan seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat mengenai kebutuhan tentang pendidikan. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemui kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah haruslah mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pembangunan dan perkembangan pendidikan di setiap lapisan masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah dengan semua aparat jajarannya sangat perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap.

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah sebagai penyedia fasilitas untuk pendidikan. Dalam peran pemerintah seperti ini, pemerintah seharusnya bisa lebih barbour dengan masyarakat dan dapat menangkap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai

apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang pendidikan seperti fasilitas sekolah yang ada dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Peran pemerintah sebagai pendamping.

Selain mempunyai tugas utama sebagai pelayan masyarakat, pemerintah juga mempunyai peran sebagai pendamping dalam bidang pendidikan. Artinya, pemerintah dapat mendampingi masyarakat, menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat mengenai pendidikan. sehingga masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah selalu ada untuk mendampingi mereka untuk memperoleh jawaban atas keluhan atau aspirasi yang telah mereka sampaikan mengenai pendidikan yang ada di daerah masing-masing. sehingga dengan seperti itu masyarakat merasakan peran pemerintah begitu nyata karena mendampingi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi masyarakat itu sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai mitra.

Peran pemerintah sebagai mitra yaitu pemerintah menjalin kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Dalam menentukan suatu kebijakan dalam pendidikan harus mengerti dan dapat memahami bagaimana keadaan pendidikan di setiap daerah. untuk itu, setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat dibicarakan dengan pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tentang pendidikan. perlunya mitra atau kerjasama antara

pemerintah, pihak sekolah dan masyarakat dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam membuat kebijakan yang baru.

3. Peran pemerintah sebagai penyandang dana.

Peran pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang ada di daerah dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat.

4. Konsep Nelayan

Menurut Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Menurut Windy (2013: 7) nelayan adalah masyarakat yang tempat tinggal mereka tidak jauh dari wilayah pantai atau perairan dan secara aktif melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung didekat pantai atau perairan sebagai mata pencahariannya. Menurut Mulyadi dalam Nina (2016: 3) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung kepada hasil laut.

Sedangkan menurut Nina (2016: 6) nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Imron dalam Fanesa (2014) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Pada umumnya masyarakat nelayan tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Menurut Kusnadi dalam Fanesa (2014) secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Menurut Sastrawidjaya dalam Fanesa (2014) komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir.

Dilihat dari alat penangkapan ikan yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi atau alat penangkapan yang lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional.

Berdasarkan pengertian nelayan diatas dapat dijelaskan nelayan adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang menggantungkan kehidupannya kepada hasil laut yang dilakukan dengan cara penangkapan ikan atau melakukan budi daya.

Adiligi dalam Nina (2016: 5) mengemukakan secara umum kriteria profil nelayan yaitu:

- a. Sumber mata pencaharian utamanya yaitu mencari ikan di laut.
- b. Keterampilan yang dimiliki atau yang diperoleh dari pengalaman sebagai buruh atau ikut serta pergi melaut dengan yang lain.
- c. Pekerjaan penuh resiko bahkan tidak jarang bergelut dengan maut akibat keganasan laut.
- d. Tidak menentunya pendapatan karena bergantung dari tangkapan yang diakibatkan oleh angin dan musim.
- e. Tidak adanya modal sehingga hanya bergantung kepada hasil tangkapan yang ditentukan oleh musim atau cuaca.
- f. Hidup dari hari ke hari tanpa kepastian karena pendapatan yang tidak menentu.

5. Konsep Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 mengatakan :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untu memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut Fuad Ihsan (2008) makna pendidikan secara umum adalah usaha manusia untuk mengembangkan poten-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Defenisi penidikan yang dikemukakan oleh para ahli (Fuad Ihsan, 2008) :

- a. Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda.
- b. *Dictionary of Education* mengatakan pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku didalam masyarakat, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terkontrol dan terpilih, sehingga dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
- c. *Crow and Crow* mengatakan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.
- d. Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 10930 mengatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak, dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajemukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik.
- e. Di dalam GBHN tahun 1973 mengatakan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Dari beberapa pengertian pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses bagaimana seseorang mengembangkan potensi atau kemampuan

yang dimiliki baik itu dalam bentuk tingkah laku, intelektual, maupun jasmani berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat

Menurut Fuad Ihsan (2008) fungsi pendidikan dalam arti ,mikro adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan dalam arti makro (luas) adalah :

- a. Pengembangan pribadi
- b. Pengembangan warga negara
- c. Pengembangan kebudayaan.
- d. Pengembangan bangsa.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan suatu bangsa, artinya dengan pendidikan dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil, dapat menguasai ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan suatu bangsa (Morin, 2017). Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 mengatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab. Proses pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan, artinya suatu proses untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang dapat memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan mutu pelayanan pendidikan.

Pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional yaitu:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh para peserta didik. Dalam Fuad Ihsan (2010 : 22-23) jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

- a. Pendidikan Dasar.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam

masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

b. Pendidikan Menengah.

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan mengadakan interaksi atau hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, dan lingkungan sekitar, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki lebih lanjut dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi.

c. Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Kepmendikbud No. 0186 / P / 1984).

6. Konsep Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Morin, 2017). Dalam UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial”.

Menurut Bagong (2013 : 359) seorang anak dikatakan putus sekolah apabila dia tidak dapat menyelesaikan pendidikan nya di suatu sekolah secara utuh yang berlaku sebagai suatu sistem. Misalnya di Indonesia, sekarang sudah ditetapkan program wajib belajar 12 tahun, namun ada siswa yang hanya bersekolah hanya sampai lulus SD, dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP maka anak tersebut dikatakan putus sekolah. Menurut Sarfa (2016 : 98) anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap perlakuan orang tuayang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener) dalam Morin (2017) anak putus sekolah adalah siswa yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

Ary H. Gunawan dalam Morin (2017) mengatakan bahwa anak putus sekolah adalah status yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan menurut Nazili Shaleh Ahmad (2011 :134) mengatakan anak putus sekolah adalah berhentinya seorang murid baik di tengah-tengah tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti bersekolah. Putus sekolah adalah proses berhentinya murid secara terpaksa dari sekolah atau suatu lembaga

pendidikan tempat dia belajar. Artinya terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiqon dalam Ricardo, 2017).

Dari beberapa pengertian anak putus sekolah diatas, maka dapat dikatakan bahwa anak putus sekolah adalah anak atau murid yang tidak bisa melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi keluarga yang sulit.

Secara garis besar, proses yang terjadi ketika anak sampai memutuskan sekolah menurut Marzuki dalam Bagong (2013 : 359) yaitu :

1. Berawal dari tidak tertibnya anak pada saat mengikuti pelajaran di sekolah, terkesan memahami bahwa belajar hanya sebuah kewajiban masuk di kelas dan mendengarkan guru berbicara tanpa dibarengi dengan kesungguhan untuk mencerna pelajaran secara baik.
2. Akibat prestasi belajar yang rendah. Hal ini bisa dari pengaruh keluarga atau karena teman sebaya. Kebanyakan anak yang putus sekolah selalu ketinggalan pelajaran dibandingkan teman-teman sekelasnya.
3. Kegiatan belajar di rumah tidak tertib dan disiplin. Hal ini terutam terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua.
4. Perhatian terhadap pelajaran kurang dan didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran.

5. Kegiatan bermain dengan teman sebaya yang meningkat pesat. Apalagi banyak dari teman yang putus sekolah, hal ini bisa juga menjerumuskan anak untuk tidak mau melanjutkan pendidikan.
6. Anak yang putus sekolah kebanyakan berasal dari ekonomi lemah dan berasal dari keluarga yang tidak teratur.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah menurut C.E. Beeby dalam Windy (2013 : 4) adalah :

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah faktor utama untuk melaksanakan pendidikan. karena ekonomi merupakan persoalan utama bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang dilihat secara ekonomi sangat terbatas untuk biaya pendidikan, apalagi untuk sekarang biaya pendidikan sudah semakin tinggi sehingga tidak dijangkau masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, sehingga itulah menjadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah kondisi-kondisi dalam dunia yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, perilaku anak, pertumbuhan anak, meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab penuh terhadap kedewasaan anak namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dan pengaruhnya sangat besar terhadap anak, sebab bagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak disadari pasti akan mempengaruhi anak. Misalnya banyak anak dilingkungan nya tidak sekolah atau putus sekolah pasti si anak akan juga

terpengaruh untuk berhenti sekolah karena lingkungannya banyak anak yg tidak sekolah.

c. Faktor Kesadaran Orang Tua Tentang Arti Pendidikan.

Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian kecil masyarakat di Indonesia khususnya pada masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan pedesaan pesisir beranggapan kalau pendidikan merupakan tempat untuk memperoleh pekerjaan dan adapula masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting karena mereka berpikir, walaupun mereka sekolah tinggi-tinggi tapi pada akhirnya juga akan menjadi pengangguran atau tidak menjadi nelayan kalau mereka tinggal di daerah pesisir. Pendapat seperti ini sungguh sangat keliru, karena pendidikan sebenarnya merupakan tempat untuk membentuk pribadi anak, sumber daya dan sumber pengetahuan manusia.

d. Faktor Pekerjaan.

Faktor pekerjaan ini biasanya terjadi karena tututan ekonomi keluarga, ada sebagian anak yang sudah ikut bersama orang tuanya mencari anfkah baik itu seperti ikut melaut, ke sawah, ke ladang. Hal ini sangat mempengaruhi anak, sebab dipikiran mereka untuk apa melanjutkan sedangkan yang tidak bersekolahpun dapat mencari uang, sehingga menurut pandangan mereka bahwa sekolah itu tidak terlalu penting karena menurut mereka sekolah tidak menjamin adanya atau mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya.

e. Faktor Motivasi.

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu, dengan demikian motivasi sangat penting bagi kehidupan seseorang, karena apa saja yang dilakukan manusia baik itu yang penting atau tidak penting, berbahaya atau tidak berbahaya pasti orang tersebut membutuhkan motivasi. Begitu juga dengan pendidikan seorang anak, motivasi sangat penting bagi anak-anak untuk bersekolah, karena apabila anak sekolah tanpa motivasi baik yang berasal dari dalam diri anak, orang tua pun maupun guru makan anak tersebut akan hilang semangat untuk bersekolah kemudian anak menjadi putus sekolah.

B. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsa Triana, dkk dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan adalah keadaan

keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, pergaulan bebas, pernikahan diusia dini, pandangan masyarakat akan pendidikan dan mempengaruhi pola pikir mereka yang kurang peduli dengan pendidikan. Dan peran pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Wawonii Utara adalah dengan membuat gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat, pemberian bantuan dana, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan juga bantuan dana BOS. Penelitian Elsa Triana ini membantu peneliti untuk dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dan peranan pemerintah daerah dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti.

2. Yani Talakua dengan judul “Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran stakeholder dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Ambon. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pemerintah Kota Ambon mengoptimalkan dan menimalisasi serta menekan angka anak putus sekolah di Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon juga menupayakan agar tingkat anak putus sekolah dapat ditekan sekurang-kurangnya. Serta dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Ambon pemerintah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Penelitian Yani Talakua ini kelemahannya yaitu tidak

menjelaskan bagaimana peran pemerintah Kota Ambon dalam penanganan anak putus sekolah begitu juga dengan lembaga-lembaga masyarakat tidak menjelaskan bagaimana perannya dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Ambon.

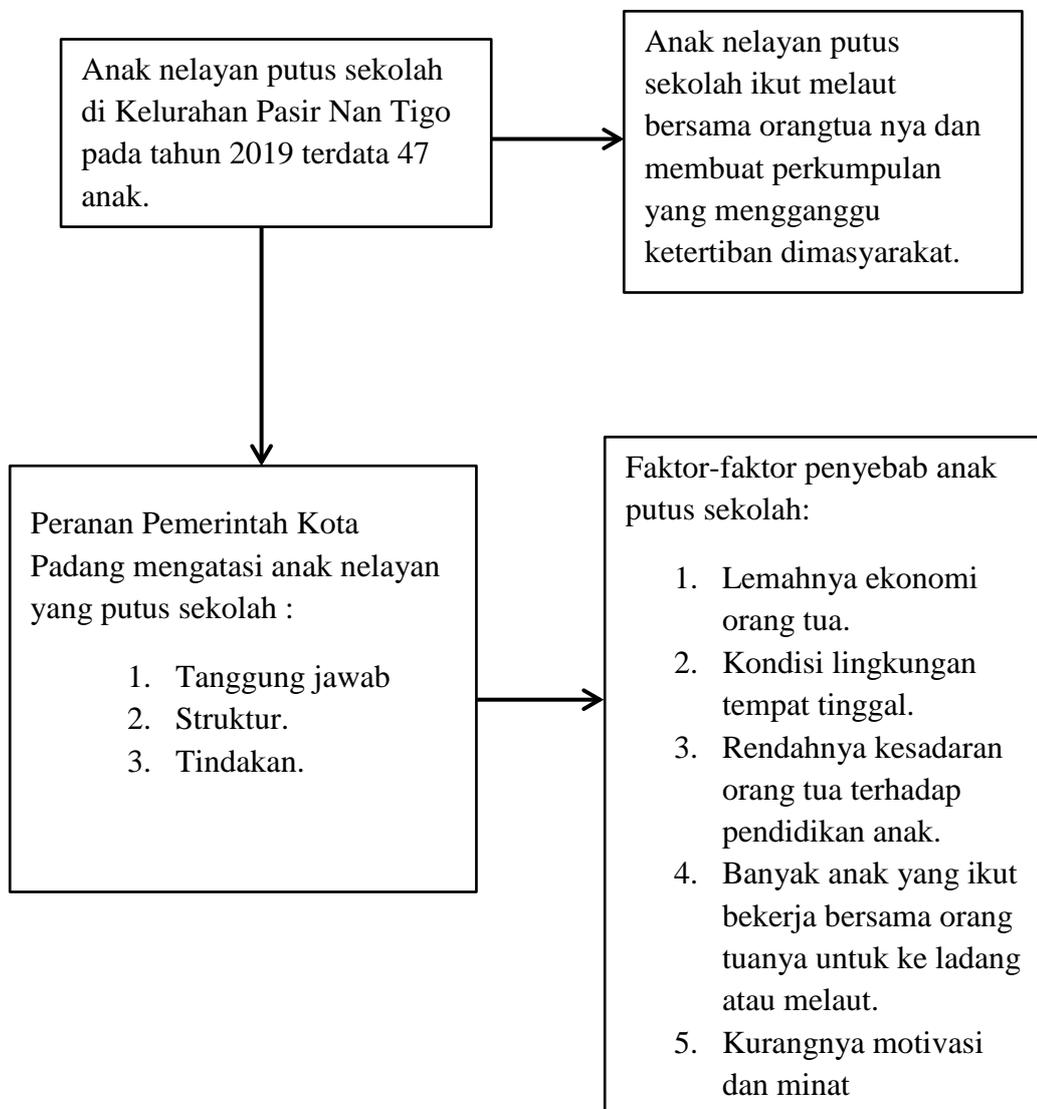
3. Ahmad Fauzi , dkk dengan judul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan upaya atau peranan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan juga menjelaskan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan peranan dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo yaitu dengan membuat kebijakan penuntasan gerakan wajib belajar 12 tahun, memberikan bantuan dana bagi masyarakat miskin, dan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kabupaten Wajo adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak dan pandangan masyarakat akan pendidikan. Penelitian Elsa Triana ini membantu peneliti untuk dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dan peranan pemerintah daerah dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Tetapi pada penelitian yang akan

peneliti lakukan, peneliti lebih memfokuskan kepada anak nelayan yang putus sekolah.

C. Kerangka Konseptual

Untuk melihat secara jelas bagaimana alur penelitian dan penulisan dapat tergambar dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa.

1. Peranan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu pemerintah Kota Padang khususnya Dinas pendidikan Kota Padang, membuat program PKBM bagi anak yang putus sekolah di Kota Padang. Dengan adanya program PKBM ini, anak yang putus sekolah bisa mendapatkan hak belajarnya kembali. Di PKBM terdapat program paket belajar A bagi anak yang putus SD, program paket belajar B bagi anak yang putus SMP dan program paket belajar C bagi anak yang putus SMA. Di PKBM juga terdapat program keterampilan. Selain PKBM, Dinas Kota Padang membuat SMP vialial tujuannya adalah agar angka putus sekolah tidak meningkat dan pemerataan pendidikan di Kota Padang. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Padang selalu gencar melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada setiap instansi dan kepada masyarakat. Selain Dinas Pendidikan, peranan pemerintah kelurahan Pasia Nan Tigo dalam mengatasi anak putus sekolah khususnya anak nelayan yaitu yaitu mengarahkan anak yang putus sekolah khususnya anak nelayan ke PKBM terdekat yaitu yang berada di Parupuk Tabing. Disini, pemerintah Kelurahan bekerja sama dengan lembaga swadaya

masyarakat yaitu GNI. Upaya lain yang sedang dilakukan oleh pemerintah kelurahan yaitu pemerintah kelurahan sudah membuat program PKBM untuk di Kelurahan Pasia Nan Tigo, namun sayangnya program yang dibuat belum terlaksana. Selain itu pemerintah kelurahan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama kepada anak yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan yang putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu yang pertama karena faktor ekonomi orang tua yang belum mampu membiayai kebutuhan anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu karena faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu kesadaran orang tua tentang arti pendidikan. yang keempat yaitu karena faktor pekerjaan. Dan yang kelima yaitu karena faktor motivasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, guna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kepada orang tua agar anaknya jangan sampai putus sekolah. Dan diharapkan semoga pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat mengikat terhadap setiap anak yang masih diusia wajib sekolah untuk melaksanakan penuntasan wajib belajar 12 tahun, sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah agar tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Pemerintah Kelurahan Pasir Nan Tigo diharapkan terus melakukan pendataan mengenai jumlah anak yang putus sekolah. dan data ini kemudian dapat dijadikan landasan untuk pemerintah kelurahan melakukan upaya-upaya dan membuat kebijakan yang dapat menjadi landasan untuk menekan angka anak putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Dan diharapkan semoga pemerintah kelurahan Pasia Nan Tigo dapat melaksanakan program PKBM yang telah dibuat. Sehingga anak-anak yang putus sekolah khususnya anak nelayan dapat melanjutkan pendidikannya, dan semoga dengan terlaksananya PKBM ini nantinya dapat mengatasi dan menekan angka anak putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Tidak hanya peran dari pemerintah kelurahan, peran masyarakat dan LSM yang ada di Kelurahan Pasia Nan Tigo dapat bekerjasama dalam menangani anak putus sekolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Nazili Saleh. 2011. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Bagong, Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi., Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuad, Ihsan. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Inu, kencana syafii. 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Miftah, Thoha. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep dan Dasar Aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, J Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhadam, Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhadam Labolo. 2014. *Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.s.
- Sumaryo, Gitosaputro., Kordiyana, K Rangga. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jurnal dan Skripsi

Ade, Dkk. 2014. *Kepedulian Nelayan Terhadap Pendidikan Anaknya Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah)*. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Dan Dosen Program Studi Pendidikan Geografi. Universitas Negeri Padang. 5 Hal.

Ahmad, Dkk. 2012. Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 2.

Andi, Muhammad Arifin Nu'mang. 2020. Peranan Pemerintahan Terhadap Implementasi Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal PRAJA*. Vol, 8. No, 1.

Elsa, Dkk. 2019. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1.

Fanesa, Fargomeli. 2014. Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Jurnal Acta Diurna*. Vol, III. No. 3.

Nina, Siti Salamiah Siregar. 2016. Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 4, No. 1.

Morin, Benjamin. 2017. Strategi Dinas Pendidikan Dalam Menimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Unsrat.

Mujiati, dkk. Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*. Vol, 18. No. 3.

Ricardo, Saputra. 2017. Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015. *Jurnal FISIP*. Vol, 4. No. 1.

Sarfa, Wassahua. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Jurnal Al-iltizam*. Vol, 1. No. 2.

Siti, Nurjanah. 2014. Human Capital dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan. *Jurnal Econosains*. Vol, XII. No. 1.

Windy, M. 2015. Studi tentang penyebab anak putus sekolah pada masyarakat nelayan desa ogomoli kecamatan galang kabupaten tolitoli. *Jurnal Untad*. Vol, 3. No. 2.

Yani, Talakua. 2018. Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Jurnal Spirit Publik*. Vol,13. No. 1.

Internet

dkp.sumbarprov.go.id diakses 15 Desember 2019.

padek.co diakses 15 Desember 2019.

sumbar.antaraneews.com diakses 20 Juni 2020.

statistik.data.kemdikbud.go.id diakses 20 Juni 2020.

Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.